

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi ekonomi global dalam dua dekade terakhir ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi digital yang secara fundamental mengubah cara aktivitas ekonomi dijalankan. Digitalisasi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga pola konsumsi masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan platform digital, memungkinkan terjadinya integrasi aktivitas ekonomi lintas sektor dan wilayah tanpa batas geografis. World Bank., (2019) menegaskan bahwa ekonomi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga membentuk ulang struktur pasar tenaga kerja melalui munculnya bentuk-bentuk pekerjaan baru yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. Izza et al., (2024) menjelaskan bahwa ekonomi digital memungkinkan integrasi aktivitas ekonomi lintas sektor dan wilayah, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, platform digital berfungsi sebagai infrastruktur utama yang mempertemukan penyedia tenaga kerja dengan pengguna jasa secara langsung. Platform ini tidak hanya berperan sebagai media perantara, tetapi juga mengatur mekanisme kerja, alokasi tugas, penilaian kinerja, serta sistem pembayaran melalui algoritma dan pemrosesan data. International Labour Organization (ILO., 2021) menyatakan bahwa perkembangan platform digital tenaga kerja telah melahirkan model pasar kerja baru yang dikenal sebagai ekonomi gig (gig economy), yaitu sistem kerja berbasis tugas atau proyek jangka pendek yang tidak mengandalkan hubungan kerja formal dan permanen. Individu yang terlibat dalam sistem ini disebut sebagai pekerja gig, yang umumnya bekerja sebagai pekerja mandiri atau mitra platform.

Pekerja non formal merupakan pekerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tidak dilindungi atau tidak diatur oleh ketentuan ketenagakerjaan

formal. Dalam konteks perkembangan pasar kerja modern, salah satu bentuk pekerjaan non formal yang semakin berkembang adalah pekerja gig (Woodcock & Graham., 2019). Gig worker memiliki pola yang searah dengan meningkatnya transisi pekerja formal menjadi informal sebagai akibat dari melemahnya perekonomian saat pandemi (Natalia & Putranto., 2023). Pekerja dalam ekonomi gig umumnya bekerja dalam periode singkat, tidak terikat kontrak kerja jangka panjang, serta berstatus sebagai pekerja lepas atau mandiri, sehingga menjadi bagian dari fenomena baru dalam dunia ketenagakerjaan yang tidak mengandalkan hubungan kerja formal sebagaimana sektor konvensional (Pratomo et al., 2024).

Tren ekonomi gig semakin meningkat dan berkembang di masyarakat secara umum, terutama seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan internet serta dipicu oleh dampak pandemi Covid-19. Ekonomi gig dapat dipahami sebagai fenomena dalam pasar kerja modern yang ditandai oleh pergeseran dari hubungan kerja konvensional menuju pekerjaan berbasis tugas atau proyek jangka pendek yang difasilitasi oleh platform digital. Istilah “gig” sendiri berasal dari dunia hiburan yang merujuk pada pekerjaan sementara atau lepas, sehingga mencerminkan karakter kerja yang tidak permanen, sementara platform digital berperan sebagai perantara yang menghubungkan pekerja dengan pengguna jasa serta memfasilitasi mekanisme kerja (Pratomo et al., 2024).

Pada dasarnya, ekonomi gig menawarkan ekosistem baru di mana pekerjaan tidak lagi terikat pada struktur pekerjaan konvensional, tetapi lebih mengarah pada proyek mandiri yang diakses melalui konektivitas digital, sehingga turut mengubah pola masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan membuka peluang kerja baru yang sejalan dengan transformasi global dan masifnya penggunaan internet (Izza et al., 2024). Perkembangan ekonomi gig di Indonesia berlangsung seiring dengan dominannya sektor informal dalam struktur pasar tenaga kerja nasional. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, yang mencerminkan keterbatasan daya serap sektor formal terhadap angkatan kerja. Kondisi ini semakin diperkuat oleh guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan

meningkatnya peralihan tenaga kerja dari sektor formal ke sektor non formal, termasuk ke dalam pekerjaan berbasis platform digital (BPS., 2025 ; ILO., 2021).

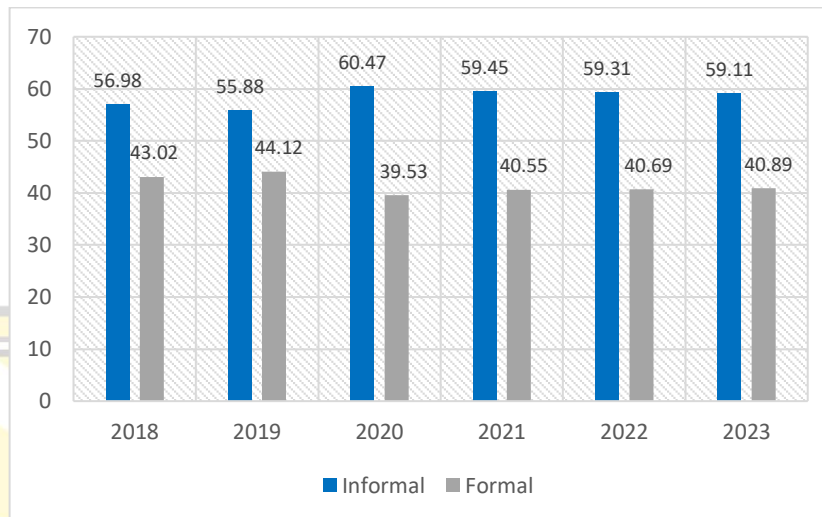
Tingginya jumlah pekerja gig membawa implikasi penting terhadap kesejahteraan tenaga kerja, khususnya kesejahteraan ekonomi yang diukur melalui pendapatan. Berbeda dengan pekerja formal, pekerja gig tidak memiliki kepastian pendapatan, upah minimum, maupun jaminan jam kerja, sehingga pendapatan yang diperoleh sangat bergantung pada karakteristik individu dan intensitas kerja. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendapatan merupakan indikator yang paling relevan dalam mengukur kesejahteraan pekerja non formal dan gig, karena mencerminkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak (Atkinson., 2015; Sitorus & Kornitasari., 2024).

Ekonomi gig menawarkan sejumlah peluang yang signifikan, seperti fleksibilitas waktu kerja, peluang memperoleh penghasilan tambahan, serta akses ke pasar yang lebih luas. Melalui platform digital seperti Grab, Gojek, Upwork, dan Fiverr, pekerja dapat menawarkan tenaga dan keterampilannya tanpa batasan geografis, membuka potensi untuk bekerja dengan klien global dan meningkatkan peluang pendapatan mereka. Platform-platform ini memungkinkan pekerja gig untuk menentukan waktu dan tempat kerja mereka, yang memberi mereka kontrol lebih besar atas kehidupan pribadi dan pekerjaan mereka, dibandingkan dengan pekerjaan konvensional yang lebih kaku. Menurut Rosenblat & Stark., (2016) fleksibilitas dalam ekonomi gig bukan hanya memberi kebebasan waktu, tetapi juga memperkenalkan model kerja yang lebih terbuka dan inklusif, yang memungkinkan pekerja untuk mengakses peluang yang sebelumnya tidak terjangkau.

Bagi perusahaan, ekonomi gig menawarkan efisiensi biaya yang signifikan, di mana mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tetap untuk karyawan penuh waktu. Dengan bergantung pada pekerja lepas yang terhubung melalui platform digital seperti marketplace dan media sosial, perusahaan dapat dengan mudah mengakses tenaga kerja terampil yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek atau tugas tertentu. Ghosh & Reio., (2024) menambahkan bahwa platform digital menyediakan kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja sesuai kebutuhan

spesifik, sehingga memungkinkan perusahaan mempercepat proses pengadaan sumber daya manusia dan mengurangi biaya operasional yang terkait dengan rekrutmen tradisional. Model ekonomi gig ini juga memberikan keuntungan dalam bentuk peningkatan efisiensi kerja dan akses cepat terhadap tenaga kerja tanpa harus terikat pada perjanjian kerja jangka panjang yang kaku. Namun, efisiensi dan fleksibilitas yang diperoleh perusahaan tersebut seringkali berimplikasi pada pergeseran risiko ketenagakerjaan kepada pekerja.

Namun demikian, di balik fleksibilitas dan kemudahan akses kerja yang ditawarkan oleh ekonomi gig, pekerja gig menghadapi berbagai bentuk kerentanan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Banyak platform digital menetapkan status pekerja sebagai “mitra”, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana hubungan kerja formal, seperti jaminan pendapatan minimum, jaminan sosial, maupun kepastian hubungan kerja. Hendrian., (2024) menunjukkan bahwa status kemitraan tersebut meningkatkan risiko ketidakpastian pendapatan, kecelakaan kerja, serta lemahnya keamanan kerja bagi pekerja gig. Selain itu, mekanisme kerja dalam ekonomi gig juga sangat dipengaruhi oleh sistem algoritma platform yang mengatur jam kerja, distribusi pesanan, serta skema insentif, sehingga tingkat otonomi pekerja menjadi terbatas dan berpotensi berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Naibaho., (2025) menjelaskan bahwa ketergantungan pada sistem algoritmik dapat menciptakan tingkat ketidakpastian pendapatan yang tinggi, mengingat algoritma platform seringkali bersifat tidak transparan serta dapat mengubah kriteria penugasan dan pembayaran secara sepihak.



Gambar 1. 1 Proporsi Sektor Pasar Tenaga Tahun 2018-2023 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan proporsi tenaga kerja formal dan informal selama periode 2018–2023. Data tersebut memperlihatkan bahwa sektor informal secara konsisten mendominasi struktur pasar tenaga kerja nasional, dengan proporsi pekerja informal selalu berada di atas 55 persen sepanjang periode pengamatan. Bahkan, pada tahun 2020, proporsi pekerja informal mencapai titik tertinggi sebesar 60,47 persen, seiring dengan terjadinya guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi sektor formal dan penurunan kapasitas penyerapan tenaga kerja formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor informal berperan sebagai *buffer sector* dalam menyerap tenaga kerja ketika perekonomian formal mengalami tekanan (Badan Pusat Statistik., 2025).

Meskipun pada periode pasca pandemi terlihat adanya pemulihan sektor formal, data hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa proporsi pekerja informal masih berada pada angka yang relatif tinggi, yaitu sebesar 59,11 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemulihan pasar tenaga kerja formal berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya mampu menggeser dominasi sektor informal. Persistensi tingginya proporsi pekerja informal mencerminkan adanya perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja Indonesia, yang ditandai oleh meningkatnya pekerjaan dengan karakter fleksibel, tidak permanen, dan minim

perlindungan ketenagakerjaan. Fenomena ini sejalan dengan berkembangnya ekonomi digital dan meluasnya pekerjaan berbasis platform yang mendorong munculnya pekerja gig sebagai bagian dari sektor informal modern (ILO., 2021). Lebih lanjut, dominasi sektor informal sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1 memiliki implikasi langsung terhadap isu kesejahteraan tenaga kerja, khususnya dari sisi pendapatan. Pekerja di sektor informal, termasuk pekerja gig, umumnya menghadapi ketidakpastian pendapatan, ketiadaan jaminan sosial, serta ketergantungan pada intensitas kerja dan permintaan pasar. Penelitian Wood et al., (2019) dan Schor et al., (2020) menegaskan bahwa pendapatan pekerja gig sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu dan kondisi pekerjaan yang dijalani, sehingga tingkat kesejahteraan yang dicapai bersifat heterogen.

Perkembangan platform digital dalam satu dekade terakhir telah mempercepat pertumbuhan pekerjaan berbasis aplikasi di Indonesia. Laporan International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa platform digital di sektor transportasi, pengantaran makanan, logistik, dan jasa freelance mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menyerap jutaan tenaga kerja. Pekerjaan berbasis platform memberikan akses kesempatan kerja bagi masyarakat yang sebelumnya sulit memasuki sektor formal. Namun, ILO., (2021) juga menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan sistem perlindungan ketenagakerjaan yang memadai, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam aspek kesejahteraan pekerja.

Dalam pekerjaan berbasis platform, digitalisasi kerja menjadi faktor struktural utama yang membentuk kondisi kerja pekerja gig. Platform digital menggunakan sistem algoritmik untuk mengatur distribusi pesanan, penentuan tarif, evaluasi kinerja, serta pemberian insentif secara otomatis. Mekanisme ini menyebabkan pekerja sangat bergantung pada keputusan sistem digital yang tidak sepenuhnya transparan. Penelitian oleh Kellogg et al., (2020) menunjukkan bahwa algoritma dalam pekerjaan digital berfungsi sebagai instrumen kontrol yang membatasi otonomi pekerja, karena keputusan kerja ditentukan oleh sistem yang sulit dipahami dan tidak dapat dinegosiasikan oleh pekerja. Kondisi ini berdampak

pada ketidakpastian pendapatan dan meningkatnya intensitas kerja, yang berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan pekerja gig. Lebih lanjut, Rani & Furrer., (2021) menegaskan bahwa digitalisasi kerja melalui platform menciptakan bentuk fleksibilitas kerja yang bersifat semu, dimana pekerja tampak memiliki kebebasan waktu kerja, tetapi pada praktiknya terdorong untuk menyesuaikan diri dengan permintaan algoritma agar memperoleh pendapatan yang memadai. Ketergantungan pada sistem digital ini menyebabkan pekerja harus bekerja lebih lama atau lebih intensif pada jam-jam tertentu, sehingga meningkatkan risiko kelelahan kerja dan menurunkan kualitas hidup.

Selain faktor struktural dalam ekonomi gig, kesejahteraan pekerja juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu dan kondisi sosial-ekonomi yang melekat pada pekerja itu sendiri. Dalam konteks ini, pengalaman kerja menjadi salah satu determinan penting karena dapat meningkatkan keterampilan, efisiensi, serta kemampuan adaptasi terhadap sistem kerja berbasis platform. Studi oleh Mincer (1974) dalam teori *human capital* menyatakan bahwa pengalaman kerja berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan individu. Namun, dalam ekonomi gig, pengalaman kerja formal sebelumnya tidak selalu relevan, terutama jika jenis pekerjaan gig yang dilakukan berbeda, sehingga efeknya terhadap pendapatan bisa menjadi tidak signifikan atau bahkan lemah.

Selanjutnya, jam kerja secara teoritis memiliki hubungan positif dengan pendapatan, di mana semakin banyak waktu yang dicurahkan untuk bekerja, semakin besar peluang memperoleh penghasilan. Hal ini sejalan dengan teori penawaran tenaga kerja klasik. Namun demikian, dalam ekonomi gig, hubungan ini tidak selalu linier karena adanya *diminishing returns* akibat kelelahan, serta pembatasan permintaan oleh algoritma platform. Penelitian Rosenblat dan Stark (2016) menunjukkan bahwa distribusi pekerjaan seringkali dikendalikan oleh algoritma, sehingga tambahan jam kerja tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan.

Dari sisi pendidikan, teori modal manusia menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan peluang memperoleh pendapatan

yang lebih baik. Pekerja dengan pendidikan tinggi cenderung mengakses pekerjaan gig berbasis keahlian (*high-skill gig work*) yang memiliki bayaran lebih tinggi dibandingkan pekerjaan berupah rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Berg et al. (2018). Namun, secara kontradiktif, beberapa studi menemukan bahwa *overeducation* juga sering terjadi dalam ekonomi gig, di mana individu berpendidikan tinggi justru bekerja pada pekerjaan dengan produktivitas rendah, sehingga pengaruh pendidikan terhadap kesejahteraan menjadi tidak optimal. Umur juga menjadi faktor yang relevan dalam menentukan kesejahteraan pekerja gig. Individu pada usia produktif umumnya memiliki kapasitas fisik dan kemampuan adaptasi teknologi yang lebih baik. Penelitian oleh Kässi dan Lehdonvirta (2018) menunjukkan bahwa pekerja muda lebih aktif dan kompetitif dalam platform digital. Namun, di sisi lain, pekerja yang lebih tua sering memiliki pengalaman dan jaringan yang lebih luas, sehingga dapat mengimbangi keterbatasan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan umur dengan pendapatan tidak selalu bersifat monoton.

Dari aspek demografis, jenis kelamin juga berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Secara umum, literatur ekonomi tenaga kerja menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan (*gender wage gap*). Studi klasik oleh Blau and Kahn., (2017) menemukan bahwa perbedaan upah gender masih persisten di berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks ekonomi gig, fleksibilitas kerja yang ditawarkan platform digital pada awalnya dianggap mampu mengurangi kesenjangan tersebut karena perempuan dapat menyesuaikan jam kerja dengan tanggung jawab domestik. Namun, penelitian oleh Cook et al., (2021) menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan tetap terjadi, bahkan pada platform yang relatif netral, disebabkan oleh perbedaan jam kerja, pengalaman, dan preferensi risiko. Selain itu, studi oleh Rosenblat dan Stark., (2016) juga mengindikasikan adanya potensi bias algoritma yang dapat memperkuat ketimpangan tersebut. Dengan demikian, pengaruh jenis kelamin dalam ekonomi gig masih menjadi perdebatan empiris.

Terakhir, wilayah mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi, tingkat permintaan pasar, serta akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital. Pekerja gig di wilayah perkotaan cenderung memiliki peluang pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan karena tingginya permintaan jasa dan penetrasi platform digital. Hal ini didukung oleh laporan World Bank., (2019) yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi digital lebih terkonsentrasi di wilayah urban dengan infrastruktur yang lebih baik. Namun, di sisi lain, tingkat persaingan di wilayah perkotaan juga lebih tinggi, sehingga dapat menekan pendapatan rata-rata pekerja. Penelitian oleh Kässi dan Lehdonvirta., (2018) menunjukkan bahwa distribusi tenaga kerja digital yang terkonsentrasi di wilayah tertentu dapat meningkatkan kompetisi global, yang pada akhirnya menekan upah. Hal ini menunjukkan bahwa efek wilayah terhadap kesejahteraan tidak selalu bersifat positif.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun ekonomi gig menawarkan fleksibilitas dan peluang kerja alternatif, tingkat kesejahteraan pekerja gig cenderung tidak merata dan relatif rentan. Studi oleh Schor et al., (2020) menemukan bahwa sebagian besar pekerja gig harus bekerja lebih lama untuk mencapai tingkat pendapatan yang layak, terutama di negara berkembang. Andrian., (2025) juga mencatat bahwa pendapatan pekerja platform digital umumnya berada di bawah standar upah layak, terutama bagi pekerja dengan keterampilan rendah. Ketergantungan pada jumlah jam kerja yang tinggi seringkali berdampak pada penurunan kualitas hidup dan keseimbangan kerja-kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesempatan kerja melalui ekonomi gig tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap pendapatan pekerja gig menjadi sangat penting dalam menilai dampak nyata ekonomi digital terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

Permasalahan kesejahteraan pekerja gig semakin relevan mengingat dominasi sektor informal dalam struktur pasar tenaga kerja nasional. Pekerja gig di Indonesia pada umumnya diklasifikasikan sebagai bagian dari sektor informal karena tidak memiliki hubungan kerja formal dan jaminan ketenagakerjaan.

Penelitian Sitorus dan Kornitasari., (2024) menunjukkan bahwa pendapatan pekerja gig di Indonesia sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu dan kondisi pekerjaan yang dijalani. Shobikin et al., (2025) juga menemukan adanya ketimpangan pendapatan antar pekerja gig berdasarkan faktor demografis dan wilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan pekerja gig belum tercapai secara merata dan masih menghadapi berbagai kendala struktural

Lebih lanjut, literatur empiris menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja gig tidak terbentuk secara acak, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Faktor-faktor seperti pengalaman kerja, jam kerja, tingkat pendidikan tinggi, kelompok generasi, jenis kelamin, dan wilayah tempat bekerja terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pekerja gig (Schor et al., 2020). Pekerja dengan pengalaman kerja dan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses ke pekerjaan gig dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Selain itu, perbedaan wilayah mencerminkan ketimpangan akses terhadap pasar, infrastruktur digital, dan permintaan jasa berbasis platform. Oleh karena itu, kesejahteraan pekerja gig merupakan hasil dari interaksi kompleks antara karakteristik individu dan kondisi struktural pasar tenaga kerja.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja gig, antara lain pendidikan, jam kerja, pengalaman kerja, kelompok generasi, jenis kelamin, dan wilayah. Studi oleh Sitorus dan Kornitasari., (2024) menemukan bahwa jam kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pekerja gig di Indonesia. Sementara itu, Zareka et al., (2025) menekankan pentingnya faktor wilayah dan akses ekonomi dalam menentukan kesejahteraan pekerja gig. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum menguji pengaruh faktor-faktor tersebut secara simultan dalam satu model empiris yang komprehensif. Selain itu, kajian yang secara spesifik mengaitkan pengalaman kerja formal, karakteristik demografis, dan faktor wilayah terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian yang

perlu diisi melalui analisis kuantitatif yang komprehensif untuk memahami determinan kesejahteraan pekerja gig secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara empiris pengaruh pengalaman kerja, jam kerja, pendidikan, kelompok generasi, jenis kelamin dan wilayah terhadap kesejahteraan pekerja non-formal berbasis platform digital di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian ekonomi ketenagakerjaan serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Pekerja Non-Formal Berbasis Platform Digital di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia?
2. Apakah jam kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia?
3. Apakah pendidikan tinggi berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia?
4. Apakah kelompok generasi berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia?
5. Apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia?
6. Apakah wilayah tempat bekerja berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh jam kerja terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia.

3. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan tinggi terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh kelompok generasi terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia.
6. Untuk menganalisis pengaruh wilayah terhadap kesejahteraan pekerja gig di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai gig economy dan kesejahteraan pekerja, khususnya terkait pengaruh digitalisasi kerja, hubungan kerja non formal, jam kerja, sistem pembayaran, dan jaminan sosial. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi studi-studi selanjutnya yang meneliti dinamika pasar kerja digital di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi bagi pekerja gig mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mereka sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan kerja. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi perusahaan platform untuk memperbaiki sistem algoritma, mekanisme pembayaran, serta menyediakan dukungan yang lebih baik bagi mitra kerja mereka.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Dari sisi kebijakan, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah sebagai pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Hasil penelitian ini dapat mendukung penyusunan kebijakan mengenai jaminan sosial, perlindungan kerja minimal, serta kejelasan status hubungan kerja bagi pekerja platform.